



› KEKERASAN JALANAN

Pelaku Klithih Bakal Disanksi Kerja Sosial

JOGJA—Dalam rangka meminimalkan angka kasus kekerasan jalanan (*klithih*), Pemkot Jogja punya satu terobosan, khususnya terkait dengan sanksi yang diberikan kepada para pelaku *klithih*, khususnya dari kalangan remaja dan anak-anak.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan selain upaya pencegahan, sanksi juga harus diberikan agar bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku *klithih*. Sebagai upaya pencegahan, patroli sudah dilakukan oleh polisi, Satpol PP serta aparat keamanan di wilayah.

Terkait dengan sanksi, Heroe mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Jogja agar pelaku *klithih* yang kebanyakan masih di bawah umur bisa memperbaiki masa depannya. Dia mengusulkan jika remaja yang terlibat kasus *klithih* dikenai sanksi untuk ikut bekerja sosial di tempat-tempat semacam panti jompo. "Pelaku *klithih* kan kemanusiaannya kurang. Dengan melayani simbah-simbah di panti jompo diharapkan menumbuhkan kembali rasa kemanusiaannya," ungkapnya.

Klithih menjadi fenomena sosial yang telah meresahkan masyarakat. Untuk menanggulangi ini, diperlukan menurunkan. "Masyarakat di wilayah juga perlu membantu

pengamanan," ujarnya, Jumat (14/2).

Ia mencontohkan semisal serelah sekolah si anak harus ke panti jompo untuk melayani, lalu saat hari libur juga harus di sana. Kerja sosial juga diharapkan bisa diteraplan pada pelaku yang dipidana. "Bukan fokus pada sanksinya, tapi menumbuhkan rasa kemanusiaannya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Jogja, Zenni, menjelaskan awal 2020 Kota Jogja kembali diresahkan dengan sejumlah aksi *klithih* yang semua pelakunya merupakan pelajar sekolah. "Dari data yang kami peroleh, di Kota Jogja terdapat setidaknya 24 geng sekolah dari SMP, SMA dan SMK," kata dia.

Di samping itu, pihaknya juga mengintensifkan peran keluarga untuk menjaga anak-anaknya agar terhindar dari *klithih* baik sebagai pelaku maupun korban. Dia melihat berbagai persoalan yang menyebabkan remajaterjerumus dalam *klithih* berawal dari persoalan di keluarga.

"Saat musrenbangkel [musyawarah rencana pembangunan kelurahan] di 14 kelurahan juga sudah saya sampaikan setiap kelurahan harus mulai memperhatikan lingkungan anak, terutama keluarga untuk bisa menyapa anaknya. Keluarga bisa jadi pencegah awal," katanya. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005